

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar(*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman

tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri(Suryawati, 2005:122). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

b) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehinggamenyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c) Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Jhingan (2012:16), ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

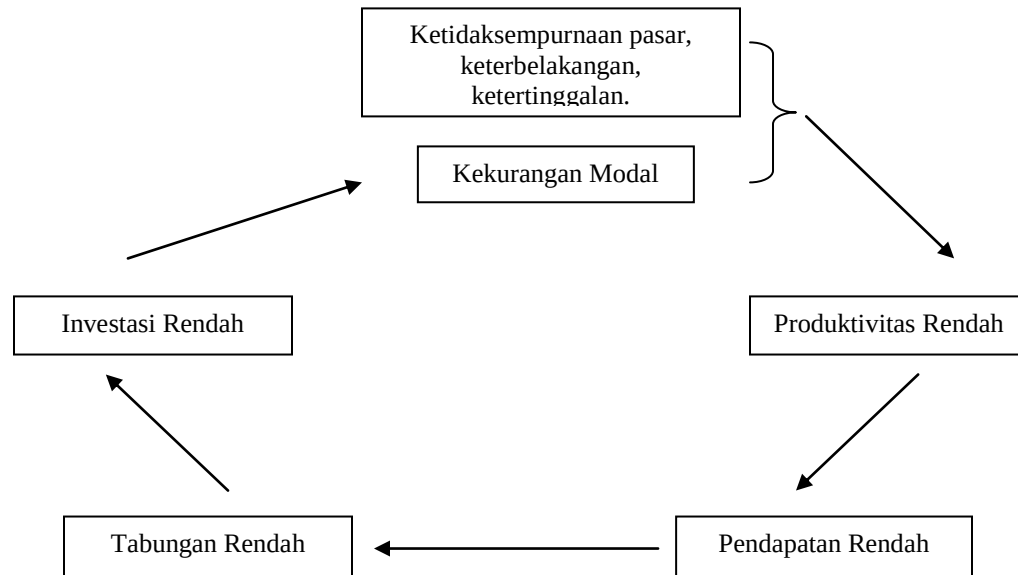
2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan(*Vicious Circle of Poverty*)

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang digambarkan pada Gambar 4. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan

rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



Sumber: Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro, 2000

Gambar 4. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) oleh Nurkse

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat

pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

3. Mengukur Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan (GK) makanan dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Perhitungan garis kemiskinan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kalori perkapita perhari. Sedangkan Garis

Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan.

Secara umum cara untuk mengukur kemiskinan secara global dapat digunakan standar pengukuran dari *Word Bank*. Melalui cara ini dapat dibandingkan kondisi secara umum di berbagai negara, namun diperlukan konversi terlebih dahulu standar yang digunakan per negara ke dalam standar *Word Bank*. *World Bank* membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*purchasing power parity*/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan ditingkat global /internasional

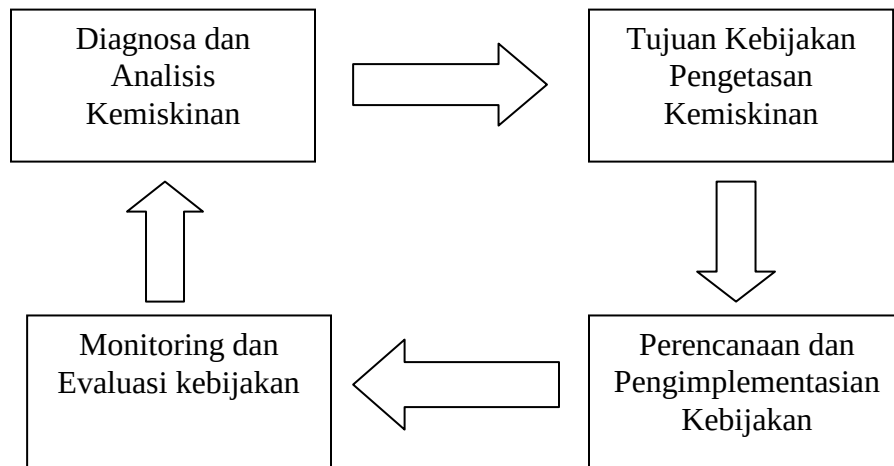
4. Proses Perumusan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan telah dilakukan Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* – MDG). Tantangan pertama yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan ini adalah memilih kebijakan dan program yang tepat dari alternatif yang ada. Memilih program dan kebijakan harus yang efektif tergantung pada (a). pemahaman mendalam tentang kekuatan dan program penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dan (b). adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

Pada akhirnya sistem monitoring dan evaluasi yang berhasil dan baik akan berguna jika keluaran, hasil, dan dampak yang jelas, layak, terukur sebagaimana diharapkan, serta indikator pengukuran penanggulangan kemiskinan ditentukan sejak awal. Kadang kala menetapkan indikator tersebut merupakan tantangan tersendiri. Hal itu membutuhkan antara lain pemahaman dan keterampilan yang lebih memadai terkait monitoring dan evaluasi yang efektif dikalangan analisis program dan kebijakan diseluruh tingkat pemerintahan.

Salah satu prioritas lain yang ditekankan pemerintah adalah memastikan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan dan melakukan penguatan kapasitas baik ditingkat nasional maupun daerah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pro-rakyat miskin yang efektif. Secara umum proses pembuatan kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu diagnosa dan analisis kemiskinan, pembuatan tujuan kebijakan, perencanaan dan pengimplementasian kebijakan dan monitoring, serta evaluasi kebijakan. Setiap tahapan ini mempunyai peran yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Kunci utama keberhasilan kebijakan atau program kemiskinan adalah perumusan yang baik. Dalam perumusan kebijakan secara ideal perlu dilakukan sesuai dengan penahapan yang ada seperti yang dijelaskan pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses Perumusan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Perumusan kebijakan secara tepat dalam membuat program pengentasan kemiskinan bukan segalanya karena program tersebut juga harus berkelanjutan, oleh karena itu diperlukan dua strategi untuk membuat program menjadi berkelanjutan yaitu dari sisi produksi dan penghidupan. Sisi produksi ini menangani masalah yang berkaitan dengan aktivitas untuk mendorong kelompok miskin mendapatkan pendapatan. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa melibatkan mereka dalam kegiatan produksi maupun dunia kerja.

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Untuk Daerah

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2014. Kebijakan disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung

dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis, dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

1) Kebijakan Penganggaran

Anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (*pro poor*) mempunyai beberapa prinsip. Anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menggunakan prinsip keadilan anggaran (efektif, efisien, dan adil) program/kegiatan mempunyai indikator yang jelas dan terukur. Perencanaan dan penganggaran difokuskan pada akar masalah dari kemiskinan memberikan kesempatan pada masyarakat miskin agar dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan; masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi atas langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Anggaran *pro poor* adalah praktik penyusunan dan kebijakan dibidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Anggaran *pro poor* dapat dilihat dari dampaknya apakah dapat meningkatkan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Kebijakan anggaran yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan jumlah orang miskin di Provinsi Lampung akan sulit tercapai bila orientasi alokasi anggaran tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak

direalokasikan untuk tujuan mendorong peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Dalam kebijakan penganggaran dapat didorong untuk menjamin terselenggaranya penganggaran yang berpihak untuk kepentingan orang miskin (*Pro Poor Budgeting*).
- b) Penggalan potensi serta optimalisasi pendanaan Non-APBD (*Corporate Social Responsibility/CSR*, lembaga sosial dan amal) sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
- c) Kesamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam menyusun anggaran serta pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut.

2) Kebijakan Integrasi Perencanaan

Dalam penyusunan perencanaan pro miskin (*pro poor planning*), diperlukan persiapan yang matang. Perencanaan pro miskin yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari seluruh dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Tindak (*Action Plan*) Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan dokumen lain yang memuat kebijakan dan regulasi (termasuk antara lain adalah pedoman umum dan pelaksanaan, dokumen proyek, surat keputusan, dan sebagainya).

Semua dokumen perencanaan tersebut harus saling terintegrasi dan memuat perencanaan yang pro masyarakat miskin.

Penentuan prioritas program perlu dilakukan dalam proses perencanaan pro masyarakat miskin. Penentuan prioritas upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui dua strategi berikut: (1) penetapan kebijakan/program khusus, dan (2) peningkatan mutu program-program yang ada agar lebih *pro-poor*. Misalnya pengembangan prasarana fisik pada sektor pelayanan dasar perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan dan pemerataan akses.

3) Kebijakan Penguatan Kelembagaan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu upaya agar semua pihak dapat berperan aktif, perlu adanya penguatan kelembagaan yang mampu mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kelembagaan adalah salah satu persoalan yang amat mendasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penguatan kelembagaan menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi serta asistensi secara terpadu antarlintas pelaku, lintas program dalam penyiapan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun di tingkat provinsi sudah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), namun masih banyak lembaga di luar TKPK yang secara

langsung maupun tidak turut menyumbang peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu disusun arah penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- a) Memperkuat kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan daerah (TKPKD)
- b) Koordinasi dengan pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Departemen/LPND untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat miskin yang telah dibina dan berkembang selama ini.
- c) Koordinasi dengan dunia usaha dan LSM dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok miskin.
- d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik secara individual maupun kelembagaan, internasional, nasional dan lokal untuk mengembangkan berbagai peluang bagi pengentasan kemiskinan pada kelompok masyarakat sangat miskin (*the poorest among the poor*).

4). Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan

sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap (*ratuagung78.blogspot*)

B. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakanpembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan regional antar daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan agar sarana pembangunan dapat tercapai secaratepat.

Salah satu tujuan pembangunan sacara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembanganyang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro dan Smith, 2004). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan

seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan,2005:46).

Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

C. Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno,2001).

Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan ini dalam buku Keynes menjadi landasan dalam perkembangan teori makro ekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekonomi dan pihak pemerintah di dalam zamannya ahli-ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik menekankan tentang

perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang. Disini mereka menekankan tentang perlunya menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu :

a) Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.

Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatannasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.

b) Kebijakan yang menyangkut perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut *tax reform* (pembaharuan pajak). *Tax reform* yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.

c) Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.

Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan

bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

2. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Teori Rostow dan Musgrave

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, seperti misalnya dalam menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan

terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana menjadi pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesehatan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP.

Hukum Wagner dikenal dengan “*The Law of Expanding State Expenditure*”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

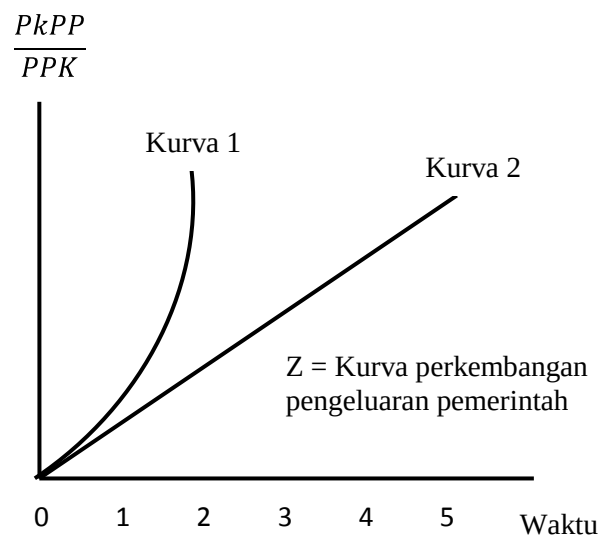
$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993

Gambar 6. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu

yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva tersebut menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

Teori Peacock dan Wiseman

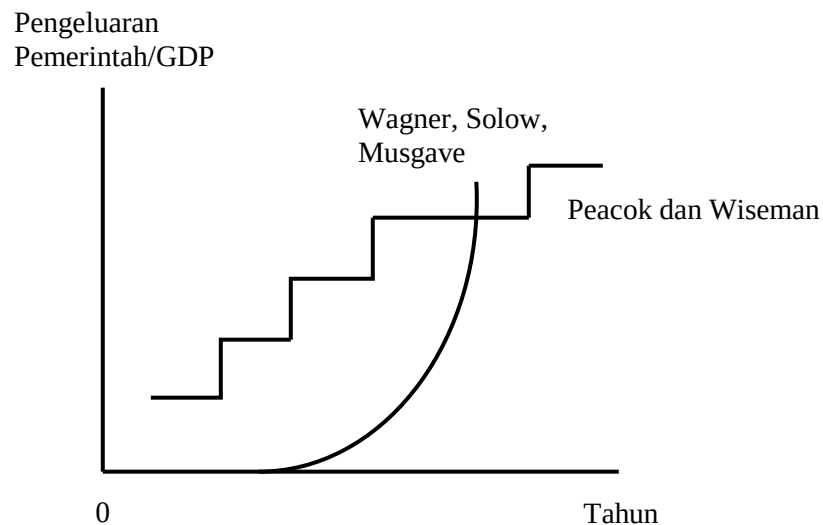
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah

yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, , tetapi berbentuk seperti tangga.



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993

Gambar 7. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgravedigambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

D. Teori *Human Capital Invesment* (Investasi Sumber Daya Manusia)

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemikirannya Theodore Schultz tentang *investment in human capital*.

Menurutnya pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan. Dalam perkembangannya, Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Terdapat dua pendekatan penting dalam teori *human capital* yaitu: pendekatan Nelson-Phelps (1966) dan pendekatan Lucas (1988). Pendekatan oleh Nelshon-Phelps, Aghion dan Howitt (1966) menyimpulkan bahwa *human capital* merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Munculnya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan diberbagai negara lebih disebabkan oleh

perbedaan dalam *stock human capital*. Aghion dan Howitt mendukung pendekatan Nelson-Phelps tentang *stock human capital* yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja yang lebih ahli dan terdidik akan lebih mampu mengisi kualifikasi lapangan pekerjaan yang ditentukan. Dengan kata lain pekerja yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mampu merespon inovasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Meier dan Rauch dalam Mukhlis, 2010).

Sedangkan pendekatan Lucas (1988) lebih menekankan adanya suatu signifikansi akumulasi *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya terdapat dua faktor yang menjadi penyebab adanya pembentukan *human capital* di suatu negara. Kedua faktor tersebut adalah pendidikan dan *learning by doing* (Mukhlis, 2010)

Kesehatan dan pendidikan bukan hanya sekedar input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan. Sekelompok orang yang berpendidikan akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat di sekelilingnya, seperti menciptakan berbagai inovasi yang berguna bagi komunitasnya (Todaro, 2003:404).

Pembangunan manusia didasarkan pada tiga tujuan akhir pembangunan: masa hidup (*longevity*) diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang dan rata-rata tahun bersekolah, serta standar kehidupan (*standard of living*) yang diukur dengan

pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* atau PPP) untuk mencerminkan biaya hidup (Todaro,2003:413)

E. Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya., Menurut Sukirno (2001:294) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkan, yaitu :

- a. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan perekonomian mengalami kemunduran, perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaanya hal itu berarti jam kerja dikurangi, mesin memproduksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja diberhentiakn. Dengan demikian kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran
- b. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan stuktur dan kegiatan ekonomi. Dua kemungkinan yang dapat menimbulkan pengangguran struktural adalah akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat semakin canggihnya teknik memproduksi.

- c. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

- a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

- b. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Jumlah penduduk yang terlalu besar, dan diikuti oleh perkembangan penduduk yang sudah sangat cepat, menyebabkan rasio perbandingan diantara ranah tenaga kerja sangat kecil.

- c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku untuk kegiatan bercocok

tanam. Waktu diantara menuai dan masa menanam berikutnya dan periode di antara sesudah menanam bibit dan masa memetik hasilnya, dalam periode tersebut banyak diantara petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan pekerjaan

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. Dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu (a). Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, (b). Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, (c). Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu (a).Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan. (b). Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. (c). Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Sukirno, 2001:297)

F. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000:56), PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian

dan jasa-jasa. Menurut Badan Pusat Statistik angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung. b) Konsumsi

pemerintah. c) Pembentukan modal tetap domestik bruto. d) Perubahan stok. e) Ekspor netto.

G. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Untuk Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Kemiskinan

Menurut Kumar dalam Setyopurwanto (2013:5) modal manusia sangat berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang terkandung pada manusia yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang akan berguna dalam produksi barang, jasa dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itulah maka kunci utama dari modal manusia adalah pendidikan dilengkapi oleh faktor lain diantaranya kesehatan, lingkungan kerja, dan faktor lainnya.

Engelbrecht dalam Situmorang (2007) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berguna untuk meningkatkan penghasilan individu dan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dalam bidang pendidikan memberi peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang karena dengan pendidikan maka para pekerja diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoperasikan, mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan memanipulasi modal fisik.

Campbell dan Stanley dalam Situmorang (2007) menyebutkan investasi dalam modal manusia adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam hal produktivitas pada waktu tertentu.

Produktivitas pekerja meningkat melalui perbaikan kesehatan baik secara fisik dan mental serta melalui perpindahan lokasi tempat mereka bekerja. Peningkatan investasi sumber daya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong peningkatan pendapatan (produk domestik bruto) riil. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan stok, neraca perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumber daya manusia cenderung menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan cenderung mengurangi angka kemiskinan (Sitepu, 2009:153)

H. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan, bagi sebagian masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau bahkan tidak memiliki pekerjaan, maka tidak ada pendapatan yang diperoleh, semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan maka semakin banyak masyarakat tidak mendapatkan pendapatan, dengan demikian hanya sebagian masyarakat saja yang menikmati pendapatan. Masyarakat yang bekerja part-time atau bahkan tidak memiliki pekerjaan selalu berada dalam kelompok yang rentan (Todaro, 2003)

Sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi

pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka masalah pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. (Octaviani, 2001)

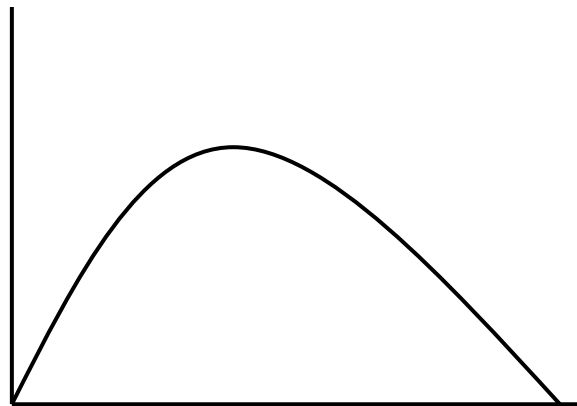
I. Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Dalam literatur, kemiskinan sering disandingkan dengan kesenjangan pendapatan. Korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan hubungan pertumbuhan dan kesenjangan. Menurut Simon Kuznets (hipotesis Kuznets) kurva hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Demikian juga hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan

ekonomi. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun.

Tingkat Kesenjangan



Sumber : Todaro dan Smith, 2004

Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi

Gambar 8. Kurva U Terbalik dalam Hipotesis Kuznets

Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada Hipotesis Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor-sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing - masing sektor. (Ferreira dalam Isnawati, 2007).

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Peneletian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. Samsubar Saleh (2002)	Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan Variabel Independen: PDRB perkapita (YPC) kesenjangan pendapatan (RG) Indeks Pembangunan Manusua (IPM) Angka harapan hidup (HH) Rata-rata bersekolah (RS) Investasi sumberdaya manusia (IMP) Investasi fisik (IFP) Tingkat partisipasi politik dan ekonomi dari perempuan Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas kesehatan (PNH) Krisis Ekonomi	1. Model estimasi dengan menggunakan data <i>cross section</i> . 2. Model estimasi dengan menggunakan data panel, di mana, <i>POV</i> adalah variabel terikat sedangkan X_j adalah variabel penjelas, i dan t adalah propinsi ke- i dan waktu ke- t .	PDRB perkapita (YPC) mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan antar provinsi. kesenjangan pendapatan (RG) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Angka harapan hidup (HH) dan rata-rata bersekolah (RS) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi sumberdaya manusia (IMP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Di lain pihak, investasi fisik (IFP) justru signifikan namun positif. Tingkat partisipasi politik dan ekonomi dari perempuan signifikan positif. Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas kesehatan (PNH) signifikan positif pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.
2.	Produktivitas, Investasi Sumberdaya	Variabel Dependen : Kemiskinan	1. Estimasi model simultan	Tingkat kemiskinan di Indonesia akan mampu direduksi secara

	Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Hasdi Aimon (2012)	Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Investasi Sumber Daya Manusia Investasi Fisik Kesempatan Kerja	Kemiskinan (Y1t) di Indonesia dipengaruhi oleh investasi pendidikan (X1t), investasi kesehatan (X2t), produktivitas (X3t) dan pertumbuhan ekonomi (Y2t). 2. Estimasi Pertumbuhan ekonomi (Y2t) dipengaruhi oleh produktivitas (X3t), investasi fisik (X4t) kesempatan kerja (X5t) dan kemiskinan (Y1t).	signifikan oleh investasi pendidikan, investasi kesehatan, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang optimis. Apabila investasi pendidikan dan investasi kesehatan meningkat, maka produktivitas masyarakat juga akan meningkat dan selanjutnya tingkat kemiskinan akan menurun. Sedangkan produktivitas, investasi fisik, dan kesempatan kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, sementara apabila tingkat kemiskinan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan tereduksi.
3.	Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu	Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Menggunakan analisis data panel (<i>pooled data</i>) dengan menggunakan	Variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh

Rejekingsih (2013)	Variabel Independen: Kesehatan Pendidikan Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran	panel data adalah kombinasi antara <i>time-series data</i> dan <i>cross-section data</i> . Data yang digunakan adalah data <i>time series</i> selama 4 tahun terakhir yakni tahun 2007-2010 dan data <i>cross section</i> sebanyak 35 data yang mewakili kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data <i>time series</i> dan <i>cross section</i> menghasilkan 140 observasi.	negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan dan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan akan juga meningkat. Namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.	
4.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh. Bursa	Variabel Dependen: Persentase Kemiskinan	Untuk melihat pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),	Semua variabel memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dari tiga variabel yang

(2011)	Variabel Independen: Laju PDRB Pendidikan atau Angka Melek Huruf Pengangguran	Pendidikan (Educt) dan variabel tingkat pengangguran (Un Empl)) terhadap kemiskinan (Poverty) digunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> dikarenakan N besar dan T kecil selain itu bahwa unit <i>cross-section</i> yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka harus menggunakan <i>fixed effect</i> .	digunakan terdapat dua varaibel yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu variabel PDRB dan Un-Empl, sementara variable Educt ber pengaruh tetapi tidak signifikan.	
5.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan	Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan Variabel	Dalam penelitian ini menggunakan data time series selama 5 tahun dan data cross section sebanyak 10	Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95 persen ($\alpha= 5$ persen), varibel upah minimum, pendidikan

	Pengangguran terhadap Kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010. Indah Novarizki Ayu (2011)	Independen : Upah Minimum Pendidikan Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten/Kota menggunakan data panel dengan metode fixed effect (FEM) dan menggunakan variabel dummy wilayah.	dan tingkat pengangguran secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi secara statistic tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil regresi terhadap dummy wilayah, menunjukkan hasil bahwa dari 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memiliki perkembangan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.
6.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan	Variabel Dependen: Jumlah Penduduk Miskin	Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1998-2006 dan model analisis data menggunakan	Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap

	Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. Masniari Dalimunthe (2008)	Variabel Independen : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Investasi PMDN Kondisi Perekonomian (Dummy Variabel)	Regresi Linier Berganda menggunakan OLS (<i>Ordinary Least Square</i>).	jumlah penduduk miskin Sumatera Utara, Investasi PMDN mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Sumatera Utara, variabel dummy (kondisi perekonomian mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin Sumatera Utara.
7.	Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008. Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Variabel Dependen: Kemiskinan Variabel Independen : PDRB Pendidikan (Melek Huruf), Pengangguran	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan metode FEM dengan bantuan software Eviews 6.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
8	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, dan Jumlah	Variabel Dependen: Jumlah penduduk Miskin	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif

Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. Prima Sukmaraga (2011)	Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia PDRB Per Kapita Pengangguran	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS) yang menggunakan data antar ruang (<i>cross section</i>) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dengan bantuan <i>software Eviews 4.1</i>	dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
--	--	---	---